

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SURALAGA LOMBOK TIMUR

VILLAGE GOVERNMENT STRATEGIES IN DEVELOPING THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SURALAGA, EAST LOMBOK

Oryza Pneumatica Inderasari^{1*}, Saipul Hamdi³, Syarifuddin², Ikmal Maulana⁴

^{1,2,3}Universitas Mataram Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

e-mail: oryza.sociologist@unram.ac.id*

Diserahkan: 12/04/2022; Diperbaiki: 21/06/2022; Disetujui: 27/06/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i1.256

Abstrak

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis yang ditimbulkan akibat Covid-19 berupa pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung non tunai yang ditujukan untuk membantu masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam menutupi kebutuhannya. Kebijakan yang ada belum mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PMI di Suralaga. Kebijakan tersebut membutuhkan strategi khusus di lapangan yang melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemerintah desa dalam menangani dampak sosial-ekonomi PMI pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis sosial-ekonomi pada kalangan PMI. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PMI di Kecamatan Suralaga. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga mengeluarkan strategi untuk mengembangkan perekonomian PMI di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 meliputi, pengembangan usaha pertanian, peternakan, kewirausahaan berbasis potensi keluarga, UMKM, hingga mendukung akses untuk menjadi PMI Ilegal. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober 2021-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Desa, PMI, Pengembangan Ekonomi, Covid-19

Abstract

Both central and local governments have issued policies to overcome the crisis caused by Covid-19 by providing social protection for the community consisting of direct cash assistance and direct non-cash assistance to assist the Indonesian Migrant Workers community in meeting their needs. Existing policies have not been able to provide solutions to the problems they face in Suralaga. The policy requires a particular strategy in the field that involves the village government as the spearhead of implementing the policy. This study aims to explore the village government's strategy in dealing with the socio-economic impacts of Migrant Workers during the Covid-19 pandemic in Suralaga District, East Lombok. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic has resulted in a socio-economic crisis among

Migrant Workers. The policies issued by the central and local governments have not been able to be a solution to solve the problems faced by Migrant Workers in Suralaga Sub-district. Following up on this, the local government in Suralaga issued a strategy to improve the Migrant Worker's economy in Suralaga during the Covid-19 pandemic, including developing agricultural businesses, livestock, family potential-based entrepreneurship, and MSMEs to support access to become illegal Migrant Workers. This research was conducted for six months (October 2021-March 2022) using qualitative methods and a phenomenological approach. Data are collected through observation-participation, deepening, FGD and documentation.

Key words: *Migrant Workers, Economy, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan wabah yang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ketenagakerjaan. Covid-19 menjadi hambatan terbesar bagi pekerja sektor informal dalam menjalankan mata pencahariannya untuk melengkapi kebutuhan hidup, sebagaimana penelitian oleh Syahril (2020), menjelaskan bahwa wabah Covid-19 mampu menciptakan kondisi dunia yang memberlakukan karantina, larangan bepergian, dan penutupan akses lainnya yang mengakibatkan terjadinya dampak transformatif terhadap pekerja dan perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya pekerja yang dirumahkan dan deportasi. Wahyu Putoro dalam Harian Republika (2020) menyebutkan bahwa menindaklanjuti dampak pandemi Covid 19, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan dengan pemberian perlindungan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan ini diberikan kepada 29,3 juta masyarakat yang termasuk dalam 40% rumah tangga termiskin atau kelompok masyarakat paling rentan terdampak pandemi Covid-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal, serta pelaku usaha transportasi daring (Putro, I. P., & Purnomo 2022). Bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari APBDes maksimal sebesar 35% dari dana desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah/kota dan merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa untuk mempertahankan permintaan barang di masyarakat dan kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha serta meminimalisir dampak Pekerja yang dirumahkan akibat wabah Covid-19 (Ipang, 2020).

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat sumbangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggi. Berdasarkan data penempatan pekerja migran Indonesia yang dimuat dalam Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2021) menunjukkan bahwa pekerja migran asal NTB sebesar 40.805 jiwa, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan 50% dari total yang ada berasal dari kabupaten Lombok Timur, yang juga merupakan kabupaten kedua tertinggi di Indonesia setelah Indramayu dengan angka mencapai 24.526 jiwa (BP2MI, 2021). Suralaga merupakan salah satu kecamatan asal pekerja migran di Lombok Timur dengan jumlah pekerja yang tinggi. Berdasarkan data BPS Lombok Timur (2020), jumlah pekerja migran Indonesia atau sebelumnya disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kecamatan Suralaga berjumlah 3.566 jiwa. Suralaga menjadi kecamatan asal PMI yang masih intensif melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri di setiap tahunnya, serta memiliki rekam jejak sebagai daerah penyumbang pekerja migran yang telah berlangsung lama hingga saat ini. Pekerja Migran Indonesia di Suralaga menjadi salah satu kelompok yang mengalami masa ekonomi akibat wabah Covid 19 (Jalaludin, 2021). Ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai pekerja migran Indonesia membuat masyarakat Suralaga mengalami kesulitan dalam mengembangkan perekonomiannya pasca lockdown dan penutupan akses di negara tujuan tempat bekerja. Pengalaman dan skill yang telah didapatkan sebelumnya seharusnya dapat menjadi modal utama untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid 19 tetapi secara realitanya belum dapat diterapkan dengan

optimal Indonesia, bahkan menyebabkan angka pengangguran baru (Ariefianto & Ulum, 2019; Arifiartiningih, 2017).

Penelitian yang membahas tentang penanganan akibat wabah Covid 19 yang dialami pekerja migran Indonesia tidak banyak dilakukan, mayoritas tulisan tentang pekerja migran secara umum membahas tentang tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi keluarga buruh migran (Niã, B., & Sari 2017), perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi buruh migran perempuan (Herawati, 2010), tantangan migrasi pengelolaan remitansi dan kekerasan terhadap buruh migran perempuan asal lombok di Malaysia dan Arab Saudi (Hamdi, S., 2021), dinamika problematika sosial perlindungan buruh migran Indonesia pasca reformasi dan relevansinya dengan tantangan wirausaha di era masyarakat ekonomi Asean (Mihardi & Siregar, 2018), komunikasi partisipatif untuk pemberdayaan buruh migran (Sulaiman et al., 2016), dan perceraian di kalangan buruh migran (Anshor, 2016). Adapun tulisan berkaitan dengan pekerja migran selama masa pandemi Covid 19 yang sangat terbatas dan terfokus pada perlindungan buruh migran Indonesia selama masa pandemi Covid 19 (Sulistiyono et al., 2021), nasib pekerja migran Indonesia (PMI) selama masa pandemi Covid 19 (Rahmawati & Kamilah, 2021), problematika dan perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan pada masa pandemi Covid-19 (Hajar, S., 2021), perlindungan hukum atas jaminan kesehatan bagi pekerja migran Indonesia di masa pandemi Covid-19 (Indiantoro et al., 2022), terakhir penelitian yang dilakukan bersamaan berjudul strategi survival pekerja migran di masa pandemi covid-19 di Suralaga, Lombok Timur (Hamdi, S., 2022). Melihat tulisan-tulisan tersebut tidak ada yang membahas secara spesifik tentang strategi pemerintah desa dalam membantu ekonomi kelompok pekerja migran sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan dapat menutup gap dari literatur sebelumnya yang menyorot pekerja migran pasca pandemi.

Pihak Pemerintahan pusat dan daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menangani peluasan wabah Covid 19 yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), social distancing, dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini belum mampu mengatasi banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat, bahkan pada momen tertentu menambah persoalan karena masyarakat tidak bisa keluar rumah dan sangat terbatas dalam bekerja. Berangkat dari persoalan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan oleh pemerintah desa dalam menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap kelompok pekerja migran di kecamatan Suralaga, Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan oleh pemerintah desa dalam terhadap kelompok pekerja migran Indonesia di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data (Creswell dan Miller, 2010).

Penelitian ini dilakukan di Desa Suralaga, Desa Paok Lombok, dan Desa Dasan Borok yang berada di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Tiga desa tersebut merupakan desa asal migran yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 20 informan yang terdiri dari pemerintah daerah, aparatur desa, tokoh masyarakat, pekerja migran Indonesia di Suralaga, penyalur buruh migran, dan aktivis pemerhati buruh migran/LSM. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis kualitatif untuk mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Dampak Covid-19

Ditengah mewabahnya Covid 19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan penanganan dampak Covid 19 dengan mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Physical Distancing dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan penularan pandemi Covid-19 di Indonesia (Kurniawan et al. 2021). Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program prioritas dengan mengeluarkan program perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 meliputi masyarakat miskin, pekerja informal, serta pelaku usaha transportasi daring, yang difokuskan untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat dan meminimalisir dampak tenaga kerja dirumahkan akibat pandemi Covid-19 (Ipang, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pemerintah desa di Kecamatan Suralaga yang terdiri dari Desa Suralaga, Desa Paok Lombok, dan Desa Dasan Borok menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanganan Covid-19 seperti pemberlakuan PSBB, Physical Distancing, dan khususnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dijalankan dan dimonitoring oleh pemerintah desa di Kecamatan Suralaga (Wawancara, 2022). Berkaitan dengan pemberian bantuan langsung tunai, tidak ada kriteria khusus yang menjelaskan bahwa pekerja migran Indonesia termasuk dalam kriteria masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga, tidak semua PMI yang terdampak Covid-19 di Suralaga mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga mengupayakan penyaluran bantuan kepada PMI terdampak Covid-19 di Suralaga dengan memasukkannya ke dalam kriteria penerima bantuan sosial tunai (BST), sebagai bentuk perhatian terhadap masalah yang dihadapi PMI di Suralaga. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga yang mengatakan:

“Untuk Covid kemarin ada, bantuan itu dimasukkan ke dalam penerima bantuan sosial tunai (BST). Datanya dimasukkan di dinas sosial. Ada penerima BPMT, tapi itu sudah masuk dalam BPKS. Ini mencakup warga masyarakat yang ekonomi dari menengah ke bawah, dan buruh migran masuk kesana. Karena dalam pemerintah pusat untuk penerima bantuan sosial, sampai saat ini belum ada, termasuk yang sifatnya penyuluhan-penyuluhan itu tidak ada. Kalaupun misalnya ada, kita akan fasilitasi, tapi sampai saat ini belum ada” (wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 oleh pemerintah pusat dan daerah belum mampu menyentuh dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya kelompok PMI terdampak Covid-19 di Suralaga.

Respon Pekerja Migran Suralaga Terdampak Covid-19 terhadap Penerapan Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia seperti, pembatasan Sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), *social distancing*, *physical distancing*, dan program perlindungan sosial dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) maupun non tunai kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Setiap Kebijakan yang ada dilaksanakan oleh masing-masing aparat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Kecamatan Suralaga menjadi salah satu kecamatan yang ikut serta menjalankan kebijakan yang ada untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 terhadap masyarakat, dan khususnya kepada PMI di Suralaga menjadi salah satu kelompok rentan yang merasakan dampak akibat pandemi Covid-19.

Respon pekerja migran Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Suralaga menunjukkan kesamaan yakni, kebijakan yang ada dinilai belum mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini dipengaruhi oleh dampak yang dirasakan PMI di Suralaga menyentuh semua kalangan termasuk kalangan PMI yang sudah memiliki usaha maupun yang berprofesi tunggal sebagai PMI. Sehingga pemberlakuan PSBB, PPKM, dan pembatasan lainnya menjadi masalah bagi mereka *sebab* menghambat akses pekerjaan mereka sebagai PMI. Mereka menilai bahwa bantuan berupa BLT belum mampu membantu dalam meringankan kebutuhan hidup, dan ini mendorong masyarakat untuk menempuh jalur ilegal dalam mengakses pekerjaan mereka sebagai PMI. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Jalaludin berikut ini:

“Namanya orang cari duit kenapa kita larang mereka, memang sempat ditutup tapi yang namanya orang mencari uang ada saja jalannya, berarti ada yang berangkat ketika covid-19 ini, tapi yang sejak awal-awal itu ndak ada yang berani berangkat tapi sekarang banyak yang sedang berangkat melalui jalur ilegal di perbatasan Kalimantan Barat” (wawancara tanggal 2 Maret 2022).

Menjadi PMI ilegal dinilai sebagai satu-satunya solusi membantu mengurangi hambatan ekonomi yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Menjadi PMI ilegal bukan menjadi persoalan bagi masyarakat di wilayah kecamatan Suralaga. Besarnya hasil yang didapatkan dengan menjadi PMI ilegal membuat sebagian besar masyarakat lebih memilih menjadi PMI ilegal dibandingkan dengan menempuh jalur legal yang sangat kompleks, dan susah dengan birokrasi pemerintah. Dengan hal tersebut, maka pada masa pandemi Covid-19 masyarakat tetap nekat pergi keluar negeri untuk bekerja meskipun dengan jalur ilegal. bagaimana yang disampaikan oleh Hamudin selaku PMI di Suralaga berikut ini:

“Perbulan selama saya menjadi buruh migran ilegal saya bisa mendapat gaji 3000 ringgit, sehingga kalau kita rupiahkan saya bisa mendapatkan 9.500.000.00/ bulan. Dan itu sangat banyak dibandingkan saya menjadi buruh migran legal” (wawancara tanggal 14 Maret 2022).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya gaji yang didapatkan di luar negeri membuat masyarakat termotivasi untuk tetap bekerja sebagai PMI. Hal tersebut juga membuat masyarakat lainnya tertarik dan tergiur karena besarnya hasil yang didapatkan dari bekerja sebagai PMI. Selain karena faktor ekonomi, hal yang membuat masyarakat di Suralaga memutuskan untuk bekerja sebagai PMI dikarenakan pengaruh keberhasilan tetangganya yang bekerja sebagai PMI yang mengalami perubahan kondisi hidup secara signifikan dari hasil kerjanya sebagai PMI. Mereka memiliki rumah yang bagus, fasilitas pendidikan dan uang belanja yang cukup buat anak-anaknya, dan

memiliki barang mewah seperti sepeda motor. Hal ini disampaikan oleh Hamudin berikut ini:

“Faktor utama saya menjadi buruh migran ya faktor ekonomi, dan faktor yang kedua karena ketertarikan karena di dusun saya banyak sekali yang berangkat ke Malaysia, rata-rata yang pergi ke Malaysia bisa membuat rumah dan membeli pekarangan, nah itu yang membuat saya tertarik, akhirnya saya juga berniat untuk berangkat” (wawancara tanggal 10 Maret 2022).

Berdasarkan data di atas, maka dapat diungkapkan bahwa menurunnya tingkat kesejahteraan akibat pandemi Covid-19 membuat PMI di Suralaga menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti PSBB, PPKM dan *lockdown* tempat usaha menjadi faktor penghambat bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan kebijakan yang ada mendorong masyarakat di Suralaga menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja sebagai pekerja migran Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Ekonomi Pekerja Migran Pada Masa Pandemi

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pekerja migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Standar pemberian upah di suatu negara memiliki perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya, hal ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan dan biaya hidup di suatu negara. Berdasarkan rata-rata negara yang dituju pekerja migran Indonesia di Suralaga seperti negara di Uni Emirate Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Korea, besaran upah yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan besaran upah yang didapatkan Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada www.worldbank.org, 2014 bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri rata-rata memperoleh pendapatan empat hingga enam kali lebih tinggi daripada saat mereka bekerja di Indonesia. Dengan besarnya upah yang diperoleh dengan bekerja sebagai pekerja migran mendorong masyarakat Indonesia lebih memilih bekerja sebagai pekerja migran dibandingkan bekerja di Indonesia.

Menjadi pekerja di luar negeri atau pekerja migran Indonesia (PMI) memberikan pengaruh ekonomi yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat di Suralaga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh migran. Hal ini terbukti dari adanya perubahan pada kondisi ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik dari sebelum mereka bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Masyarakat dapat membangun rumah permanen dengan kapasitas dan kualitas yang bagus, kemudian mampu membeli sawah, kendaraan, dan menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dari hasil kerjanya sebagai pekerja migran Indonesia. Sebagian besar rumah-rumah permanen yang ada di Suralaga adalah hasil dari pekerjaan masyarakat sebagai PMI. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Jalaludin yang merupakan mantan Kepala Desa Suralaga:

“Untuk anaknya sekolah terutama, bangun rumah, bikin usaha, beli motor. Ini rumah yang bagus-bagus ini hasil TKI semua itu, mana ada rumah kayak begini dulu, pas orang pada berangkat sudah bisa punya rumah kayak begitu. Saya terus terang juga mantan TKI dulu memang kan saya pengusaha, tapi gara gara rugi kabur dulu ke luar negeri buat cari modal, memang kan waktu pada saat itu krisis moneter saya dapat uang 200jt sudah berhenti saya bekerja dulu di Saudi, makanya bahasa Saudi saya tau. Saya tau juga wataknya orang Saudi” (wawancara tanggal 3 Maret 2022).

Wabah Covid 19 menyebabkan berbagai negara di dunia memberlakukan karantina, larangan bepergian, dan penutupan berbagai jalur dalam mencegah penularan Covid 19 yang semakin meluas. Hal ini mengakibatkan terjadinya dampak transformatif terhadap pekerja dan perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Syahril, 2020). Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menutup akses keberangkatan ke luar negeri dengan pemberlakuan kebijakan PSBB atau dikenal juga dengan istilah *lock down*. Disamping itu, masyarakat Suralaga memiliki ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini mengakibatkan pekerja migran Indonesia di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 memenuhi kebutuhannya dari tabungan hasil kerja mereka pada saat bekerja sebagai PMI. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Zuriadi selaku PMI di Suralaga berikut ini:

“Kemarin awal pandemi Covid saya dipulangkan, karena sesuatu hal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya menggunakan uang yang saya tabung selama bekerja” (wawancara tanggal 14 Maret 2022).

Informasi dari informan tersebut menunjukkan bahwa, selama ini bekerja sebagai PMI menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat di Suralaga. Sehingga dengan ini, dapat kita simpulkan bahwa perekonomian PMI di Suralaga selama pandemi Covid-19 menurun secara signifikan dan mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi yang menimpa pekerja migran Indonesia di Suralaga.

Strategi pemerintah desa dalam Pengembangan Ekonomi PMI

Strategi Pemdes Suralaga

Secara administrasi Desa Suralaga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Suralaga dan merupakan desa induk dari desa-desa yang ada di sekitarnya. Desa Suralaga memiliki luas wilayah sekitar 52.000 Ha yang terbagi dalam 6 Dusun di dalamnya. Jumlah penduduk di Desa Suralaga mencapai 1.614 jiwa dengan 778 laki-laki dan 836 perempuan (BPS Lotim, 2020). Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya transformasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Suralaga adalah PMI. Berdasarkan BPS Lombok Timur (2020) jumlah masyarakat Suralaga yang terdata sebagai PMI berjumlah 485 jiwa. Wabah Covid 19 ini mampu menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah setempat upaya penanganan dampak Covid 19 sampai saat ini belum mampu menjadi solusi terhadap banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya kelompok pekerja migran pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut membutuhkan strategi di lapangan yang melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan.

Pemerintah desa berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12), Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pekerja migran Indonesia di Suralaga merupakan salah satu kelompok rentan terdampak Covid-19 yang mengalami masalah dalam pemenuhan perekonomiannya. Kebijakan tersebut membutuhkan strategi di lapangan yang melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Tentunya ini menjadi atensi bagi pemerintah

desa yang ada di Suralaga untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia yang ada di Suralaga.

Masyarakat di Suralaga sebagian besar berprofesi sebagai buruh migran dengan penghasilan yang tinggi. Dengan penghasilan tersebut membuat buruh migran mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai buruh migran di Suralaga belum mampu mengelola keuangannya dengan baik dan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Menanggapi hal tersebut pemerintah desa Suralaga mendorong masyarakatnya untuk mengarahkan penggunaan sebagian hasilnya untuk membuka usaha, yang salah satu usaha yang dinilai potensial untuk dikembangkan adalah usaha ternak ayam kapasitas menengah. Beternak ayam kapasitas menengah dapat dijalankan tanpa harus memiliki keahlian khusus dalam pengelolaannya, dalam pengelolaannya, beternak ayam dapat dilakukan oleh 2-3 orang untuk kapasitas menengah. sehingga usaha ini dinilai dapat menjadi pilihan usaha yang tepat untuk dijalankan oleh masyarakat yang tetap ingin bekerja sebagai PMI, dan dapat memiliki sumber penghasilan tambahan dalam pengelolaan modal yang dimiliki. Salah satu mantan pekerja migran Indonesia yang juga merupakan mantan kepala desa Suralaga sukses menjalankan usaha ternak ayam di rumahnya. Berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengembangkan hasilnya dapat kita lihat dari informasi yang disampaikan oleh Rahmat berikut ini:

“Itu dia saya rasa tidak ada yang begitu berhasil saya lihat. Hanya bisa buat rumah aja saya lihat baru kelihatan hasilnya. Tapi untuk perkembangan ini yang tidak ada karena selama ini tidak pernah kita lihat adanya pendampingan dari pemerintah untuk mendidik kita untuk bagaimana memanajemen hasil kita”

Melihat pernyataan informan tersebut, PMI di Suralaga belum mampu mengembangkan hasil yang didapatkan selama bekerja sebagai PMI, sehingga hal ini perlu adanya strategi yang diberikan untuk membantu PMI di Suralaga dalam mengatasi masalah perekonomiannya akibat dampak pandemi Covid-19. Usaha beternak ayam dapat menjadi pilihan usaha yang tepat bagi PMI di Suralaga dalam mengembangkan perekonomiannya khususnya pada masa pandemi Covid-19 maupun pasca Covid-19.

Terdapat banyak masalah yang dihadapi buruh migran terdampak Covid-19 di Suralaga. Penerapan kebijakan penutupan akses perjalanan ke luar negeri menjadi hambatan terbesar bagi buruh migran untuk kembali bekerja seperti sebelumnya. Disamping itu, migran menjadi penghasilan utama yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat banyak lapangan pekerjaan lainnya yang dapat dikembangkan oleh buruh migran, layaknya beberapa masyarakat yang sudah berhenti menjadi buruh migran dan dapat membuka usaha pertanian, peternakan, UMKM, dan lainnya. Namun, keterbatasan pengetahuan dan akses usaha mengakibatkan masyarakat memiliki ketergantungan terhadap pekerjaannya sebagai buruh migran, sehingga disaat pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang hanya menganggur dan bergantung kepada tabungan dan aset yang telah dibeli dari hasil kerja sebelumnya.

Pemerintah Desa Suralaga sangat peduli kepada kelompok pekerja migran Indonesia yang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. Upaya pelatihan dan pemberdayaan untuk usaha kerapa kali diberikan sebelum pandemi Covid-19, namun program-program tersebut belum mampu mengubah mindset masyarakat untuk mengembangkan usaha baru sebagai tambahan sumber penghasilan selain menjadi PMI. Sehingga pada masa pandemi Covid-19, PMI di Suralaga tidak dapat beradaptasi dan mengakibatkan munculnya keterpurukan ekonomi akibat tidak adanya pekerjaan yang dapat dijalankan oleh masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai PMI. Melihat persoalan tersebut, pemerintah Desa Suralaga menilai bahwa solusi yang dapat dilakukan untuk membantu permasalahan yang dihadapi PMI di Suralaga adalah dengan mengupayakan akses untuk bekerja ke luar negeri. Sehingga dengan hal tersebut,

pemerintah desa mengupayakan jalur ilegal bagi PMI di Suralaga untuk kembali bekerja ke luar negeri. Pemerintah Desa Suralaga banyak membantu masyarakat menempuh jalur ilegal untuk kembali bekerja sebagai PMI. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Jalaludin selaku mantan Kepala Desa Suralaga berikut ini:

“Kita tidak tahu jumlahnya karena banyak yang ke Malaysia timur, mereka berangkat un document walaupun covid ini, lewat Pontianak dia gak ada sponsor yang bawa dia, tapi kalau di Timur Tengah bukan dia. Baik untuk pria dan wanita kalau ke timur tengah ke uni emirate arab rata-rata 1000-1200 real gajinya, kali 3.500 sudah 3.500.000 juta itu bersih sudah, makannya ditanggung kalau di Saudi, majikan yang menanggung kalau untuk ke timur tengah ada namanya biaya operasional, dia diberikan uang 7-8 juta untuk biaya keberangkatannya, kalo ready pasportnya berani orang bayar sampai 10 juta, bagaimana tidak senang dia berangkat yang ke timur tengah orang sudah di modalkan dari sini dan tidak ada potongan sepeser pun”

Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Suralaga menilai bahwa dengan bekerja sebagai PMI, perekonomian masyarakat sangat terbantu khususnya pada masa pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga hal tersebut menjadi indikasi pemerintah mengupayakan akses secara ilegal bagi masyarakat untuk tetap bisa bekerja sebagai PMI ke luar negeri.

Strategi Pemdes Paok Lombok

Desa Paok Lombok merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Desa Paok Lombok memiliki 10 Dusun dan di setiap dusunnya terdapat 200-300 individu yang bekerja sebagai PMI dengan sebagian besar dari PMI yang ada tidak terdata dikarenakan banyak dari mereka yang menempuh jalur ilegal dalam mengakses pekerjaannya sebagai PMI. Sedangkan berdasarkan data BPS Lombok Timur (2020), jumlah PMI asal Paok Lombok hanya berjumlah 175 jiwa. Namun meskipun begitu, sekitar 80% dari PMI yang ada di Paok Lombok mampu memperoleh peningkatan ekonomi dari hasil kerjanya sebagai PMI (hasil wawancara tanggal 4 Maret 202).

Di balik banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia, Kecamatan Suralaga juga memiliki potensi unggul di bidang pertanian. Kondisi geografis wilayah dengan tingkat kesuburan tanah dan debit air yang memadai membuat Suralaga menjadi wilayah yang potensial untuk pengembangan pertanian. Sepanjang jalan di Suralaga termasuk di desa Paok Lombok dapat kita melihat banyaknya area pertanian. Pada umumnya sebelum memutuskan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, profesi yang dijalankan masyarakat adalah bertani. Selain menjadi pekerja migran Indonesia, sebagian besar masyarakat di Suralaga bermata pencaharian sebagai petani yang telah diwarisi secara turun temurun. Dengan hal tersebut, pemerintah Desa Paok Lombok mendorong masyarakatnya, khususnya kepada kelompok pekerja migran Indonesia di Suralaga mengarahkan hasil yang didapatkan dari bekerja sebagai PMI untuk digunakan sebagai modal usaha pertanian.

Pemerintah Desa Paok Lombok menilai bahwa dengan membuka wirausaha bidang pertanian dapat menjadi investasi berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi PMI di wilayah Suralaga. Usaha pertanian dinilai dapat membantu dalam peningkatan melalui pendapatan tambahan bagi masyarakat yang tetap ingin bekerja sebagai PMI, sehingga dalam suatu kondisi apabila masyarakat tidak lagi dapat kembali menjadi PMI seperti pada masa pandemi Covid-19 atau habisnya masa kerja masyarakat kedepannya, maka usaha pertanian yang telah dibangun dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat dalam menutupi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Desa menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang sebelumnya menjadi PMI sukses menjalankan usaha pertanian khususnya pada jenis sayur-sayuran. Suralaga dinilai sebagai salah satu penyuplai hasil pertanian jenis sayur-sayuran terbesar di Lombok seperti, cabai, tomat, terong, dan kacang panjang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Muh. Kencana dari hasil wawancara berikut ini:

“Khususnya di kecamatan Suralaga termasuk lahan pertanian kelas satu, geografis dataran rendah, kemudian debit air juga bagus disini. Curah hujan juga sedang, cocok untuk pertanian jenis sayur. Ini menjadi salah satu faktor. adapun dimana mereka beli atau mereka tanam sendiri, ada yang punya lahan mereka tanam sendiri, tapi kebanyakan kita lihat, mereka beli di luar. Disini tidak hanya di desa paok Lombok, kebetulan di kecamatan Suralaga itu ada 15 desa, 15 desa itu yang banyak penghasil sayurnya itu termasuk desa Suralaga, anjani, paok Lombok” (wawancara tanggal 4 Maret 2022).

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan usaha pertanian untuk PMI terdampak Covid-19 di Suralaga dapat menjadi solusi bagi PMI dalam mengembangkan perekonomiannya baik ditengah pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19 kedepannya.

Strategi Pemdes Dasan Borok

Desa Dasan Borok merupakan salah satu Desa di Kecamatan Suralaga dengan jumlah penduduk berjumlah 2.600 jiwa dan dengan kepala keluarga mencapai 865 jiwa. Desa Dasan Borok semenjak tahun 2018 dinobatkan sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif). Masyarakat Desa Dasan Borok dinilai mampu manajerial keuangan hasil kerjanya sebagai PMI dengan pengaturan keuangan berbasis ekonomi keluarga. Berdasarkan BPS Lombok Timur (2020) jumlah masyarakat Dasan Borok yang terdata sebagai PMI berjumlah 317 jiwa. Pemerintah Desa Dasan Borok mengembangkan ekonomi masyarakatnya dengan menganalisis potensi-potensi yang ada di Desanya (wawancara tanggal 17 Maret 2022).

Pengembangan ekonomi adalah kemampuan suatu daerah dalam membangun perekonomiannya untuk memperbaiki kualitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di masa yang akan datang. Hal ini ditempuh dalam proses dimana masyarakat, swasta, dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan (Wahyu Andika 2015). Pemerintah Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga menyadari bahwa mewabahnya pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam merespon hal tersebut, pemerintah Desa Dasan Borok melakukan strategi yang dinilai efektif dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19 terhadap masyarakat, khususnya kepada kelompok PMI yang ada di Dasan Borok.

Pemerintah Desa menilai bahwa Dasan Borok memiliki potensi pengembangan usaha pertanian dan peternakan sebab kondisi geografis wilayah yang dinilai dapat mendukung jalannya usaha peternakan dan pertanian. Selain itu, tingginya angka PMI di Dasan Borok menjadi sasaran utama bagi pemerintah desa dalam mengembangkan perekonomian yang dimiliki PMI di Dasan Borok, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penutupan akses kerja bagi masyarakat Dasan Borok untuk tetap bekerja ke luar negeri. Menyikapi hal tersebut, melalui penganggaran dana desa, pemerintah Desa Dasan Borok melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya dalam mengembangkan usaha pertanian dan peternakan. Pemerintah Desa Dasan Borok memfasilitasi masyarakatnya mulai dari pengadaan bibit pertanian maupun peternakan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Angga Sarimah selaku Kepala Desa Dasan Borok berikut ini:

“Kebijakan desa itu memberikan bantuan kepada masyarakat desa itu bibit petani dan peternak. Karena kami melihat potensi-potensi yang ada, sehingga ini adalah salah satu strategi dari sisi anggaran, supaya masyarakat desa Dasan Borok ini bisa bertahan” (wawancara tanggal 17 Maret 2022).

Ketergantungan PMI di Dasan Borok selama ini menjadi masalah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya pada masa pandemi Covid-19. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Dasan Borok meyakini bahwa dengan memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya terhadap kelompok PMI di Dasan Borok dapat membantu masyarakat untuk mampu bertahan ditengah krisis yang disebabkan akibat pandemi Covid-19.

Penerapan suatu program atau kebijakan harus dilandaskan pada kesesuaian antara kesiapan sebuah program dan pengelolannya, hal ini penting untuk menunjang efektifitas dari kebijakan atau program yang akan dijalankan mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan program kedepannya (Fitriyanti, 2018). Sistem manajemen potensi sumber daya dan peluang merupakan kunci dari keberhasilan sebuah usaha kedepannya (Putri et al., 2021). Pemetaan potensi yang dilakukan pemerintah desa Dasan Borok adalah langkah yang tepat dalam mengupayakan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya PMI di Suralaga. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat menjadi landasan yang ideal dalam pembuatan suatu program di masyarakat.

Selain memberikan pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan, pemerintah Desa Dasan Borok juga menyoroti potensi yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan kemampuan mengolah sumber daya lokal meliputi hasil pertanian menjadi produk makanan yang khas. Pemerintah Desa menilai bahwa dengan mengintegrasikan hasil pertanian berbentuk bahan baku dengan kemampuan masyarakat dalam mengolah bahan baku tersebut menjadi makanan, akan menjadi sebuah peluang yang dapat dikembangkan menjadi UMKM bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya UMKM yang mampu mengolah hasil pertanian masyarakat dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat kedepannya. Pemerintah Desa Dasan Borok juga mengembangkan UMKM budidaya ikan lele yang disebut dengan Budidaya Ikan Lele Bawak Perinisan (Bule Baper). Budidaya ikan lele ini merupakan representasi hasil analisis yang dilakukan pemerintah desa dalam melihat potensi yang ada di masyarakat meliputi ketersediaan lahan kosong di pekarangan rumah masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi lahan produktif dengan melakukan budidaya ikan lele. dengan melakukan budidaya ikan lele di pekarangan rumah dapat memaksimalkan nilai manfaat dari lahan yang dimiliki masyarakat dan dapat menjadi penghasilan tambahan yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap sektor ekonomi/pendapatan masyarakat (hasil wawancara tanggal 17 Maret 2022).

Untuk menunjang terbentuknya UMKM, pemerintah Desa Dasan Borok mengupayakan bantuan pendanaan dengan mengajukan permohonan anggaran untuk pengembangan UMKM ke pemerintah pusat. Pemerintah menilai bahwa dana desa bukan ditujukan hanya untuk pembangunan fisik saja, melainkan dapat menjadi penunjang peningkatan perekonomian masyarakat Desa. Sehingga dengan potensi sumber daya yang ada di masyarakat sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk memberikan dukungan untuk pengembangan kearah kemajuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Angga Sarimah selaku Kepala Desa Dasan Borok berikut ini:

“Dana desa yang disalurkan pemerintah dari semua desa yang ada sebenarnya bagaimana bisa menghidupkan perekonomian yang ada. Dengan adanya program yang ditawarkan tadi untuk sementara ini diakui ada beberapa yang kita jumpa untuk UMKM dan pembinaanya itu, bisa mengubah mindset. Rata-rata mental masyarakat karena perbulan itu sedikit, maka kembalilah menjadi buruh migran. Dan ada juga temuan masyarakat yang bahkan sudah punya rumah, punya sawah pun tapi

mungkin kenyamanan atau sekaligus jadi hobi ke Malaysia” (wawancara tanggal 17 Maret 2022).

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Dasan Borok menggunakan dana desa sebagai media pengembangan perekonomian masyarakat yang disesuaikan dengan potensi yang ada pada masyarakat. Selain itu, dengan banyaknya masyarakat Dasan Borok yang memiliki ketergantungan pada pekerjaan sebagai PMI. Hal ini mendorong pemerintah untuk tetap menghadirkan solusi yang dapat dikembangkan sebagai upaya dalam merubah pola pikir masyarakat untuk dapat mengembangkan perekonomian kedepannya.

Tiga desa yang menjadi lokasi penelitian di kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan strategi pemerintah desa yang beraragam sebagai upaya mengembangkan ekonomi PMI di masa pandemi covid-19. Kesimpulan tersebut dijelaskan dengan menggunakan tabel berikut.

Tabel 1. Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Ekonomi PMI pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga

No	Desa	Karakteristik PMI Suralaga	Potensi	Strategi Pemdes
1	Desa Suralaga	Pekerja keras/semangat bekerja, tanggung jawab, ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai PMI.	Kepemilikan modal (aset dan tabungan), kondisi geografis untuk mengembangkan usaha dalam bidang peternakan	Pemberdayaan berupa pengembangan usaha peternakan ayam dan sapi, selain itu mendukung akses menjadi PMI ilegal sebagai wujud empati terhadap permasalahan ekonomi warga.
2	Desa Paok Lombok	Pekerja keras/semangat bekerja, tanggung jawab, ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai PMI.	Kepemilikan modal (tabungan dan aset), kondisi geografis yang potensial untuk mengembangkan usaha dalam bidang pertanian	Pemberdayaan berupa pengembangan usaha pertanian jenis sayur-sayuran.
3	Desa Dasan Borok	Pekerja keras/semangat bekerja, tanggung jawab, ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai PMI.	Kepemilikan modal (dana desa dan bantuan pusat), kepemilikan sumber daya hasil alam, kepemilikan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, kepemilikan lahan	Pemberdayaan pengembangan usaha budidaya ikan lele, pengembangan UMKM berbasis lokalitas, pengembangan usaha peternakan, dan pengembangan kewirausahaan berbasis potensi keluarga.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Wabah Covid 19 menyebabkan munculnya krisis sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kalangan pekerja migran Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya penanganan dengan mengeluarkan kebijakan seperti, pemberlakuan PSBB, PPKM, *Social Distancing*, *Physical Distancing*, hingga pembentukan program perlindungan sosial dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pekerja migran Indonesia di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kalangan yang merasakan dampak pandemi Covid-19. Kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah belum bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh PMI di Suralaga, sehingga hal ini mendorong pemerintah desa di Kecamatan Suralaga melakukan strategi alternatif untuk meminimalisir dampak Covid-19 yang dihadapi masyarakatnya, khususnya terhadap kelompok PMI di Suralaga. Solusi yang dilakukan terdiri atas, pembentukan UMKM, pengembangan usaha pada sektor pertanian, peternakan, hingga memberikan akses menjadi PMI ilegal. Strategi yang dikembangkan bersumber dari hasil analisis terhadap permasalahan dan sumber daya yang dimiliki PMI di Suralaga, untuk dijadikan acuan dalam pembuatan program yang akan dikembangkan sebagai upaya merespon dampak dari pandemi Covid-19.

REKOMENDASI

Strategi yang dikembangkan oleh pemerintah desa di kecamatan Suralaga sudah relevan dengan potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki PMI di Suralaga. Namun, strategi yang ada tidak cukup dilakukan pada masa pandemi Covid-19 saja, melainkan harus dikembangkan menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Untuk pengembangan program tersebut, perlu adanya peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun *stakeholders* terkait dalam memberikan bantuan dana maupun fasilitas pendukung lainnya dalam memaksimalkan jalannya program. Jika fasilitas dan anggaran telah memadai maka program yang dikembangkan dapat menjadi media dalam mengembangkan ekonomi PMI yang ada di Suralaga kedepannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Kemendikbud yang mensponsori penelitian MBKM melalui pendanaan hibah Riset Keilmuan di kecamatan Suralaga Lombok Timur untuk tahun 2022. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada tokoh masyarakat di Suralaga, Pemerintah Desa di Kecamatan Suralaga, Pekerja Migran Indonesia di Desa Suralaga, Desa Paok Lombok, dan Desa Dasan Borok, Penyalur PMI di Suralaga, Aktivistis Pemerhati PMI/LSM, dan Stakeholders terkait atas partisipasi dan kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, M. A. 2016. "Perceraian di Kalangan Buruh Migran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 8 (No 2) 203-214.
- Ariefartiningih, A. 2017. "Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonohoso." *Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol 11 (No 1) 109-137.
- Ariefianto, L., and Ulum, M. B. 2019. "Pelatihan Inovasi Pepaya bagi Perempuan Purna Buruh Migran di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember." *Jurnal Warta Pengadilan* Vol 13 (No 4) 136-146.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2021. "Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
<https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. 2020. "Kecamatan Suralaga dalam Angka 2020. Diakses Tanggal 9 Maret 2022. <https://bit.ly/3KizrRy>
- Creswell, Jhon W, and Dana L Miler. 2010. "*Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice. 01 July. Accessed October 19, 2021.*"
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15430421tip3903_2
- Fitriyanti, S. 2018. "Strategi Pengembangan IKM Berbasis Komoditas Itik Alabio dan Purun di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol 13 (No 1) 67-72.
- Hajar, S. 2021. "Problematika dan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Intelektiva* Vol 2 (No 6) 2686-5661.
- Hamdi, S. 2021. "Tantangan Migrasi Pengelolaan Remitansi dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi." *Jurnal Resiplokal* Vol 3 (No 1) 22-24.
- Hamdi, S. 2022. "Strategi Survival Pekerja Migran di Masa Pandemi Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur" *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol 8 No 2 Juni 2022
- Harian Republika Edisi Sunday. 2020. "Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Maret 2020. Diakses tanggal 6 April 2022.
<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q7xhfb440>
- Herawati, N. 2010. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan." *Pamator Jurnal* Vol 3 (No 2) 122-127.
- Iping, B. 2020. "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol 1 (No 2) 2716-3768.
- Indiantoro, A., Izziyana, W.V., Sari, R.M., and Rimbawan, A.Y. 2022. "Perlindungan Hukum Atas Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Justiciabelen* Vol 4 (No 2): 1-10.
- Jalaludin, and Suriadi Irwan. 2019. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Buruh Migran (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 5 (No 1) 2654-8712.
- Mihardi, R.M., and Siregar, F.M. 2018. "Dinamika Problematika Sosial Perlindungan Buruh Migran Indonesia Pasca Reformasi dan Relevansinya dengan Tantangan Wirausaha di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Kawistara* Vol 7 (No 2) 179-186.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, Mikhael Andre, Kerinea Estetika Hariadi, Widya Oktarina Sulistyaningrum,

- and Ari Budi Kristanto. 2021. "Pandemi COVID-19 Dan Prediksi Kebangkrutan: Apakah Kondisi Keuangan Sebelum 2020 Berperan?" *Jurnal Akuntansi* 13:12–22. doi: 10.28932/jam.v13i1.3193.
- Niâ, B., & Sari, R. A. P. I. 2017. "Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran Di Desa Panggungrejo Gondanglegi Malang." 2017 120–44.
- Putro, I. P., & Purnomo, S. H. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Terkait Kebijakan Ppkm."
- Wahyu Andika, G. 2015. "Analisis Tingkat Pertumbuhan Dan Potensi Ekonomi Di Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013." *Artikel Ilmiah Mahasiswa* 1–9.
- Nia, B., and Sari, R.A.P. 2017. "Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran di Desa Panggungrejo Gondanglegi Malang." *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol 1 (No 1) 120-144.
- Prasetyaningsih, E.D.W., and Widjonarko. 2015. "Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Salak di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara." *Jurnal Teknik PWK* Vol 4 (No 4) 514-529.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Diakses tanggal 2 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- Peraturan Republik Indonesia. 2004. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Diakses tanggal 5 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Peraturan Republik Indonesia. 2014. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diakses tanggal 7 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-tahun-2014>
- <https://www.worldbank.org/> 28 November 2017. Indonesia Dapat Meningkatkan Peluang dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri"
- Putri, A.U., Ermanovida., Khairunnisyah, T. 2021. "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pengrajin Songket Khas Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol 16 (No 2) 141-153.
- Rahmawati, S.N., and Kamilah, F. 2021. "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia* Vol 2 (No 2): 238-273.
- Sulaiman, A.I., Sugianto, T., and Sabiq, A. 2016. "Komunikasi Pembangunan Partisipatif untuk Pemberdayaan Buruh Migran." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 13 (No 2) 233-252.
- Sulistiyono, T., Arifin, R., Wedhatami, B., and Damayanti, R. 2021. "Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 7 (No 1) 2614-3569.
- Syahrial. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ners* Vol 4 (No 2) 21-29.
- Yin, R.K. 2014. *Cast Study Research: Design and Methods*. London: Sage.